

ABSTRAK

Lintasan Penyeberangan Batulicin - Garongkong merupakan salah satu lintasan yang di kelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batulicin yang menghubungkan antara Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Lintasan Batulicin – Garongkong merupakan lintasan penyeberangan perintis berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4978/AJ.204/DRJD/2020 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2021 sehingga pada lintasan ini menerima subsidi dari pemerintah dimana hanya satu kapal yang beroperasi pada lintasan ini yakni KMP. Awu – Awu. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi lintasan penyeberangan Batulicin – Garongkong dari segi pembebanan tarif terhadap masing - masing pengguna jasa yang dominan menggunakan angkutan penyeberangan lintasan Batulicin - Garongkong dimana pada lintasan ini berdasarkan PM 104 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan sudah tidak termasuk kriteria lintasan penyeberangan perintis yang disebabkan oleh peningkatan jumlah pengguna jasa angkutan penyeberangan pada tahun – tahun belakangan ini, oleh karena itu pada evaluasi lintasan penyeberangan ini dilakukan *Forcasting* dalam menentukan *demand* dimasa mendatang, selanjutnya dalam penerimaan subsidi yang diberikan pemerintah dilakukan perbandingan antara pendapatan dengan biaya operasional yang dikeluarkan, sedangkan dari segi pembebanan tarif perlu dilakukan perbandingan antara tarif berdasarkan biaya operasional kapal, tarif berdasarkan kemampuan dan kemauan pengguna jasa dalam membayar (*Ability to Pay dan Willingness to Pay*), serta tarif berdasarkan sistem terpadu. Pada bahasan kemauan pengguna jasa dalam membayar ditentukan dari hasil survei terkait karakteristik pengguna jasa berdasarkan tingkat pendapatan responden dan isian kesukarelaan responden dalam membayar. Hasil penelitian didapatkan bahwa peningkatan jumlah pengguna jasa masih belum bisa langsung menjadi penentu apakah sebuah lintasan sudah tidak lagi dikategorikan perintis, melainkan perlu dilakukan perbandingan antara hasil analisis tarif secara keseluruhan.

Kata Kunci: Lintasan Penyeberangan, Subsidi, Biaya Operasional, ATP dan WTP, Tarif

ABSTRACT

Batulicin - Garongkong Crossing is one of the tracks managed by PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Batulicin Branch that connects between Tanah Bumbu Regency of South Kalimantan Province with Barru Regency of South Sulawesi Province. Batulicin – Garongkong Track is a pioneer crossing based on the Decree of the Director General of Land Transportation Number: KP.4978 / AJ.204 / DRJD / 2020 concerning the Determination of Pioneer Crossings in Fiscal Year 2021 so that on this track receive subsidies from the government where only one ship operates on this track, namely KMP. Awu - Awu. The study aims to evaluate the Batulicin – Garongkong crossing in terms of loading tariffs against each of the dominant service users using batulicin - garongkong crossing transportation where on this track based on PM 104 of 2019 on the implementation of crossing transportation is not included in the criteria of pioneer crossing trajectories caused by an increase in the number of users of crossing transportation services in 2019. Un lately, Therefore, in the evaluation of this crossing track, Forcasting is carried out in determining future demand, furthermore in the receipt of subsidies provided by the government, a comparison between revenue and operational costs incurred, while in terms of loading tariffs need to be done comparison between tariffs based on ship operating costs, tariffs based on the ability and willingness of service users in paying (Ability to Pay and Willingness to Pay), and tariffs based on an integrated system. In the discussion of the willingness of service users in paying is determined from the results of surveys related to the characteristics of service users based on the respondent's income level and the respondent's volunteerism in paying. The results of the study found that the increase in the number of service users still could not directly determine whether a trajectory is no longer categorized as pioneering, but it is necessary to make a comparison between the results of the overall tariff analysis

Keywords: *Crossing, Subsidy, Operating Expenses, ATP and WTP, Tariffs*